

## Perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Timur pada masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945-1949

### Moving the capital of East Java Province during The Independence Revolution 1945-1949

Fatih Mohammad Romzy<sup>a</sup>, Ari Sapto<sup>b</sup>,

*fatih.mohammad.200736@students.um.ac.id<sup>a</sup>, ari.sapto.fis@um.ac.id<sup>b</sup>*

<sup>ab</sup>Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5, Kota Malang 65145 Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding email: *fatih.mohammad.200736@students.um.ac.id*

#### ARTICLE INFO

Received: May 14, 2024

Revised: June 01, 2024

Accepted: June 24, 2024

Published: June 30, 2024

#### Permalink/DOI

10.17977/um020v18i12024p61-77

Copyright © 2024.

Sejarah dan Budaya

Email: *jsb.journal@um.ac.id*

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

#### How to Cite APA Style:

Romzy, F. M., & Sapto, A. (2024). Perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Timur pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 18(1), 61-77. <https://doi.org/10.17977/um020v18i12024p61-77>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

#### ABSTRACT

This study aims to try to find answers to the problems of Why did the capital city of East Java province move during the independence revolution? And what were the conditions of East Java at that time?. The research method used in this writing is the historical research method which includes topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography by analyzing and interpreting archival sources, photos, newspapers, books, and articles. The results of this study indicate that the relocation of the capital city of East Java province was motivated by the intervention of the Netherlands with the outbreak of the November 10 incident in Surabaya. This resulted in the government having to be implemented outside Surabaya, so the government moved to Sepanjang (Sidoarjo), this relocation continued to other areas such as Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar, and then returned to Surabaya after the Round Table Conference in Den Haag.

#### KEYWORDS

Migration; provincial capital; revolutionary

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mencari jawaban dari permasalahan Mengapa Ibu Kota Provinsi Jawa Timur pada masa revolusi berpindah? Serta Bagaimana kondisi Jawa Timur pada masa itu?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan menganalisis serta menginterpretasikan sumber arsip, foto, koran, buku, dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya perpindahan ibu kota provinsi Jawa Timur ini dilatarbelakangi dengan adanya intervensi dari Belanda dengan pecahnya peristiwa 10 November di Surabaya. Hal ini mengakibatkan jalannya pemerintahan harus dilaksanakan diluar Subabaya maka pemerintahan berpindah ke Sepanjang (Sidoarjo), perpindahan ini terus berlanjut ke daerah lainnya seperti Mojokerto, Kediri, Malang, Blitar, dan kemudian kembali ke Surabaya setelah Konfrensi Meja Bundar di Den Haag.

#### KATA-KATA KUNCI

Perpindahan; ibu kota provinsi; revolusi

## PENDAHULUAN

Proklamasi yang telah dibacakan oleh Soekarno merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang telah berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berita mengenai kemerdekaan tersebut mulai tersebar di berbagai daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penyebaran berita oleh wartawan disambut dengan antusias oleh masyarakat seperti pengibaran bendera merah putih, coretan-coretan dinding dengan tulisan seperti "*Freedom to the Glory of any Nation*" dan "*Indonesia for Indonesia*" (Suwardono, 1997). Setelah Indonesia merdeka, kondisi negaranya masih tidak stabil dan dalam kondisi mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa asing terutama Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali berkuasa di Indonesia. Bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melawan serangan Belanda, di berbagai daerah terjadi pergolakan yang sama sebagai bentuk Revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan termasuk di daerah Jawa timur.

Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan provinsi yang terletak diujung timur pulau Jawa dengan letak geografis diantara 11100 Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 70 12 Lintang Selatan – 8048" Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup>. Secara garis besar terdapat 2 bagian wilayah, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Berdasarkan administratif Provinsi Jawa Timur meliputi 29 Kabupaten dan 9 kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukotanya (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2010).

Secara demografis Jawa Timur memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat, mayoritas penduduk di Jawa Timur adalah Suku Jawa. Terdapat juga suku lainnya seperti Suku Tengger, Suku Osing, Suku Samin, Suku Madura. Dan beberapa suku yang berasal dari wilayah seperti Suku Bali, Tionghoa, Sunda, dan lainnya. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak kebudayaan seperti Reog, Ludruk, pacuan sapi. Mayoritas penduduk Jawa Timur beragama Islam, dan lainnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perekonomian di Jawa Timur meliputi berbagai macam sektor seperti pertambangan, perkebunan, pabrik, dan lain sebagainya. Serta transportasi baik darat, laut, maupun udara (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2010).

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang juga merupakan sasaran Belanda untuk merebut wilayah perkebunan, wilayah tersebut meliputi Malang, Besuki, dan Pulau Madura, untuk melancarkan agresinya Belanda mengirim pasukan Brigade X KNIL dari wilayah Sidoarjo menuju Malang dan sekitarnya, sedangkan Brigade Marinir melalui pasir putih menuju Banyuwangi dan ke Malang Timur dalam waktu dua hari (Nasution A. H., 1978). Operasi ini disebut juga dengan *operatie product* dengan target operasi berupa daerah perkebunan dan penghasil makanan, menekan Indonesia untuk menyetujui Perjanjian Linggarjati sepenuhnya, dan menguasai wilayah yang dapat dijadikan jaminan. Ketika Belanda mulai memasuki wilayah Indonesia itu menunjukkan bahwa Belanda ingin menghancurkan Negara yang merdeka dan keinginan mereka dalam memulihkan daerah kekuasaan yang telah mereka bangun sejak abad 17, sedangkan dari sudut pandang Indonesia hal itu merupakan sebuah ancaman dari pihak asing sehingga reaksi Indonesia dengan datangnya kembali Belanda adalah dengan melakukan perlawanan dalam bentuk sebuah revolusi kemerdekaan (Sapto, 2013).

Revolusi ini sendiri merupakan bentuk gerakan yang dilakukan masyarakat dari kalangan manapun, seperti tentara, laskar rakyat, para pegawai pemerintahan serta rakyat sendiri untuk melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan. Selama masa revolusi Pemerintahan Jawa Timur turut serta melakukan perlawanan terhadap agresi yang dilakukan Belanda. Perlawanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berawal ketika pecahnya Peristiwa 10 November 1945, bahkan agar pemerintahan terus berlanjut meskipun adanya agresi pusat pemerintah harus keluar dari Surabaya dan berpindah ke daerah lainnya seperti Mojokerto, Kediri, Malang, dan Blitar (Sukadri et al., 1991)

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai revolusi di Jawa Timur seperti buku yang berjudul *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur* oleh Heru Sukadri, dkk (1991), buku ini merupakan proyek penelitian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berisikan pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Jawa Timur termasuk pemerintahan, sosial-ekonomi, sosial-budaya. Kemudian buku berjudul *Sejarah Daerah Jawa Timur* oleh Bambang Suwondo et al (1978), buku ini membahas sejarah Jawa Timur dari masa prasejarah sampai masa kemerdekaan, didalamnya terdapat pembahasan mengenai perkembangan pemerintahan, kepercayaan, budaya serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa tertentu. Termasuk peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan (revolusi) yang dibahas secara umum.

Selain itu terdapat juga buku berjudul *Profil Gubernur Jawa Timur 1945-2019* oleh tim Disperpusip Jawa Timur (2020), buku ini merupakan proyek penelitian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur yang berisikan profil para Gubernur Jawa Timur yang telah ada sejak tahun 1945 sampai 2019, terdapat juga pembahasan umum mengenai peristiwa yang terjadi selama mereka menjabat termasuk pemindahan pusat pemerintahan pada masa revolusi yang terjadi pada masa Gubernur R.M.T.A Soerjo, Dr. Moerdjani, dan R. Samadikoen. Dan skripsi yang berjudul *Perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur ke Blitar Tahun 1947-1949 dan Kontribusi Terhadap Materi Sejarah Lokal Pembelajaran Sejarah* oleh Armiami (2017). Penelitian ini membahas mengenai perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur di Blitar serta peristiwa yang terjadi disana dan berfokus terhadap pembuatan materi pembelajaran melalui sejarah lokal.

Berbagai penelitian mengenai perpindahan pusat pemerintahan suatu wilayah di Indonesia juga telah banyak dilakukan oleh para akademisi seperti Ibukota Indonesia yang berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta oleh Henni Triyana dengan artikel berjudul *Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946*, Kalimantan Selatan oleh Yuke Nori Aurumbita dengan Artikel berjudul *Disertasi berjudul Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru*, Jawa Barat oleh Alex Anis Ahmad dengan Artikel berjudul *Pembentukan Wilayah Pertahanan Priangan Timur dan Perpindahan Ibukota Propinsi Jawa Barat ke Lebaksiuh Tahun 1947-1948*, Semarang oleh Nurudin Zanki dengan Artikel berjudul *Perpindahan Ibukota Pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran tahun 1971-1983*, dan Diska Meizi Arinda, Ufi Saraswati, dan Abdul Muthalib dengan Artikel berjudul *Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935 Sampai Perpindahan Pusat Pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto tahun 1937*. Dalam penelitiannya mereka menggunakan sudut pandang sejarah dengan berbagai

faktor dalam perpindahan ibu kota nya seperti adanya Intervensi asing, pengaruh ekonomi, historis, dan lingkungan (Ahmad, 2019; Arinda et al., 2017; Aurumbita, 2015; Triyana, 2013; Zanki, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur pada masa Revolusi 1945-1949.

Lingkup Temporal pada penulisan artikel ini diawali pada tahun 1945 karena pada tahun tersebut terjadi pertempuran di Surabaya berawal dengan datangnya sekutu dibawah Komando Jendral A.W.S. Mallaby dan terbunuh pada 30 Oktober 1945 sehingga pecahnya peristiwa 10 November 1945. Kemudian, temporal diakhiri pada tahun 1949 karena tercapainya perjanjian Roem Royen dan dilanjutkan dengan penyerahan kedaulatan wilayah secara utuh ke Indonesia setelah hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag berdasarkan “Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS dan harus dilaksanakan sebelum 30 Desember 1949”, sedangkan lingkup spasial dari penulisan artikel ini adalah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu wilayah yang menjadi pendaratan sekutu dengan tujuan untuk mengambil alih kembali bekas wilayah mereka.

Penulisan Artikel yang berjudul *Perpindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur pada Masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945-1949* bertujuan untuk mencoba mencari jawaban dari permasalahan Mengapa Ibu Kota Provinsi Jawa Timur pada masa revolusi kemerdekaan berpindah? Serta Bagaimana kondisi Jawa Timur pada masa itu? sehingga penulisan artikel ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebelumnya serta diharapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Historiografi di Indonesia dan dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat.

## **METODE**

Dalam penulisan artikel yang berjudul “Perpindahan Ibukota Provinsi Jawa Timur Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949” ini, metode yang digunakan penulis adalah metode sejarah. Menurut Abdurrahman (1999) metode sejarah merupakan proses yang dilakukan oleh sejarawan dalam mencari, mengumpulkan, dan menyajikan narasi sejarah secara teratur dengan fakta yang telah ditemukan.

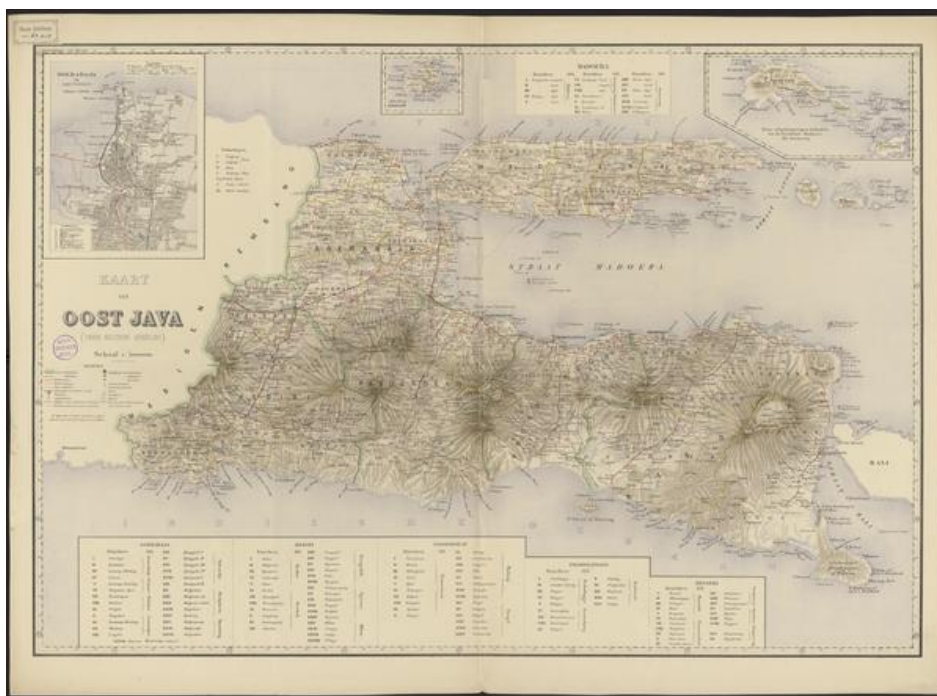
Menurut Kuntowijoyo (2013), dalam metode sejarah terdapat lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dalam pemilihan topik penulis memilih topik berdasarkan kedekatan intelektual serta adanya unsur temporal. Heuristik merupakan proses dalam mengumpulkan sumber sejarah untuk mencari fakta-fakta baru. Sumber sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu sumber primer (Arsip milik kementerian penerangan, foto, *Staatsblad*) sumber sekunder (meliputi buku, artikel, skripsi, dan disertasi).

Kemudian tahap selanjutnya berupa kritik sumber (verifikasi), dalam proses ini dilakukan seleksi sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Berikutnya interpretasi, dalam tahap ini proses yang dikerjakan berupa menganalisis data/sumber sejarah yang telah ditemukan kemudian menyatukan hasil temuan yang ada. Dan yang terakhir dalam metode ini adalah historiografi, dalam tahapan ini menulis menyajikan sebuah karya tulis hasil mengolah data dan disajikan dalam bentuk artikel.

Penulisan artikel ini merupakan bagian dari sejarah politik dengan pembahasan mengenai pemerintahan di masa revolusi, penelitian terhadap perpindahan pusat pemerintah sebuah wilayah harus dilandasi dengan teori, oleh karena itu teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan Sutikno (2007) dalam makalahnya yang berjudul *Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana* bahwa pemindahan sebuah Ibukota terdapat banyak faktor salah satunya adalah menghindari intervensi asing. seperti Ibukota Indonesia yang berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa Revolusi karena Belanda berhasil menduduki Jakarta sehingga pusat pemerintahan harus dipindahkan agar pemerintahan Indonesia tetap berjalan dan dapat melakukan perlawanan secara berkelanjutan untuk mempertahankan kemerdekaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Sebelum Kemerdekaan**



**Gambar 1.** Peta Jawa Timur  
Sumber: [digitalcollections.universiteitleiden.nl](http://digitalcollections.universiteitleiden.nl).

Sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Timur merupakan proses panjang sejak masa kerajaan sampai merdeka berdasarkan sumber epigrafis tertulis yang ditemukan seperti Prasasti Dinoyo bahwa di wilayah Jawa Timur berdiri sebuah pemerintahan yang disebut Kerajaan Kanjuruhan di Malang yang sampai kini masih menjadi perdebatan mengenai statusnya sebagai pusat kekuasaan. Berdasarkan temuan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Prasasti Dinoyo dibuat pada tahun 760 Masehi oleh Raja Gajayana, sehingga paling tidak dengan adanya sumber tertulis tertua ini menunjukkan bahwa pada masa itu terdapat aktivitas pemerintahan (Suwondo, 1978).

Pada Abad X Kerajaan di Jawa Timur mulai berkembang dari daerah pesisir Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, perkembangan ini memunculkan kerajaan-kerajaan baru seperti Medang (937 M – 1017 M), Kahuripan (1019 M – 1049 M), Daha-

Jenggala (1080 M – 1222 M), Singasari (1222 M – 1292 M). Dalam berkembangnya kerajaan-kerajaan ini Pu Sindok (929 M – 948 M) adalah orang yang telah meletakkan landasan sistem pemerintah di Jawa Timur, dengan bentuk struktur yang terdiri dari Keraton sebagai pusat pemerintahan, daerah yang disebut *watak*, dan desa yang disebut *wanua* (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).

Pada Abad XIII pemerintahan di Jawa timur berkembang dengan munculnya istilah *Negara* atau juga disebut provinsi, istilah ini muncul pada Prasasti Mula-Melurung (1225 M) pada masa Wisnu Wardhana yang menjadi struktur pemerintahan pada masa Kerajaan Singasari. Kemudian struktur pemerintahan disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit yang terdiri dari *Bhumi* sebagai pusat atau kraton, *Negara* sebagai Provinsi atau *Bathara*, *Watek/Wiyasa* sebagai kabupaten atau *Tumenggung*, *Kuwu* sebagai lurah atau *Kademangan*, dan *Thani/Wanua* sebagai dusun atau rama. Struktur ini muncul pada Kerajaan Majapahit berdasarkan pengaruh dari kepercayaan yang mereka yakin dengan beranggapan bahwa Kerajaan Majapahit merupakan sebuah jagat raya, dan rajanya sebagai dewa tertinggi yang berada di puncak Mahameru (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).

Munculnya Mataram Islam sebagai kerajaan tetap meneruskan struktur yang ada pada masa Majapahit. Menurut Moertono (2017) pada masa pemerintahan Mataram Islam struktur wilayah pemerintahannya berbentuk seperti lingkaran dengan *Kutanegara* (ibukota) sebagai pusatnya, *Negara Agung* sebagai daerah inti, *Mancanegara* sebagai daerah luar atau daerah pesisir, dan *Sabrang* sebagai daerah seberang laut. Berdasarkan struktur wilayah Kerajaan Mataram Islam Jawa Timur disebut Pesisir *Wetan* dan *Mancanegara Wetan* untuk bagian pedalaman Jawa Timur, Pesisir *Wetan* dan *Mancanegara Wetan* juga disebut *Bang Wetan* (Sapto, 2015).

Sementara itu, datanglah para pedagang Belanda untuk mencari rempah di nusantara. Selama perkembangannya pada 20 Maret 1602 para pedagang Belanda mendirikan perusahaan bernama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang melakukan monopoli perdagangan di Asia utamanya di Hindia Belanda. selama VOC berada di Hindia Belanda mereka mengutamakan keefektifan dalam sistem pemerintahannya, sehingga selama penduduk lokal memiliki kontribusi positif maka akan dimanfaatkan. Cara kerja VOC dalam memanfaatkan warga lokal adalah dengan cara menundukan para raja dan sultan serta melakukan manipulasi politik untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam berdagang (Sutherland, 1983).

Pada Akhir abad 18 tepatnya 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan dan daerah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Gubernur ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda, Herman William Daendels menjadi orang yang pertama menjadi Gubernur (1808-1811) pasca VOC dibubarkan. Pada masa kepemimpinannya sistem pemerintahan yang dibuat sebelumnya oleh VOC dirubah, seperti pembagian 9 prefektur di Pulau Jawa yang nantinya dipimpin oleh orang Belanda pilihannya dan dibantu oleh asisten Residen, di Jawa terdapat 30 Residen dengan penghapusan sistem hak turun temurun (feodal), dan pengurangan hak-hak yang didapatkan dengan aturan gaji ditentukan oleh pemerintah Belanda (Arif, 2008).

Selama masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat dua sistem pemerintahan yakni *Binnenlands Bestuur* dan *Inlandsche Bestuur*. *Binnenlands Bestuur* merupakan sistem

pemerintahan dan administrasi modern yang dijalankan oleh pejabat-pejabat Belanda, sedangkan *Inlandsche Bestuur* merupakan sistem pemerintahan dan administrasi tradisional yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pribumi. Dalam memilih pejabat untuk *Inlandsche Bestuur* para pribumi harus melalui proses yang telah ditentukan oleh Belanda dan magang di *Binnenlands Bestuur* sampai minimal 5 tahun (Sutherland, 1983).

Wilayah Provinsi Jawa Timur terbentuk sejak era penjajahan Belanda, berdasarkan *Staatsblad* tahun 1928 No. 295 disebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur dibentuk oleh pemerintah Belanda pada 9 Agustus 1928 dengan memilih Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahannya. Dan berdasarkan *Staatsblad* tahun 1939 No. 287/289 untuk Keresidenan di Jawa Timur terbagi menjadi 7 wilayah, yaitu Karesidenan Surabaya, Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Madura, Karesidenan Madiun, Karesidenan Malang, Karesidenan Kediri, dan Karesidenan Besuki (*Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 295, 1928; Staatsblad Van Nederlandsch-indie No.287/289, 1939*).

Pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia. Menurut Sudarno (1993) dalam perkembangannya di Indonesia Jepang merubah sebagian sistem pada pemerintahan Belanda, seperti menghilangkan bentuk provinsi, dan pemerintahannya ada di bawah Militer Jepang. Dalam pembagiannya terdapat tiga pemerintahan militer, yaitu Tentara Keduapuluh Lima (Angkatan Darat) yang berada di Bukit Tinggi dengan Sumatra sebagai wilayahnya, Tentara Keenam Belas (Angkatan Darat) di Jakarta dengan Jawa-Madura sebagai wilayahnya, dan Armada Selatan Kedua (Angkatan Laut) di Makassar dengan Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku sebagai wilayahnya (Fadli & Kumalasari, 2019). Pemerintahan Jepang menggunakan istilah berbeda dalam sistem pemerintahannya, seperti *Gushireikan* atau *Saiko Shikikan* sebagai panglima tertinggi, dibawahnya terdapat *Gunseikan* yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan militer dan juga kepala staf tentara (Poesponegoro & Notosusanto, 2010b).

Wilayah pemerintahannya dalam bentuk residen masih sama menggunakan sistem buatan Belanda hanya istilahnya yang berubah seperti Keresidenan menjadi *Shi* dan dipimpin seorang residen yang disebut *Sityo*, Kabupaten menjadi *Ken* dan dipimpin oleh Bupati yang disebut *Kentyo*, Kawedanan (distrik) menjadi *gun* dan dipimpin oleh Wedana yang disebut *Guntyo*, Kecamatan menjadi *son* yang dipimpin oleh Camat yang disebut *Sontyo*, Kelurahan menjadi *Ku* yang dipimpin oleh Lurah yang disebut *Kutyo*, dan Rukun Tetangga yang disebut sebagai *Tonarigumi* yang dipimpin oleh Kepala Rukun Tetangga yang disebut *Tonari Gumityo* (Sukadri et al., 1991).

### **Perpindahan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Masa Revolusi Kemerdekaan**

Kalahnya Jepang terhadap sekutu telah terdengar di kalangan pemuda yang bekerja di kantor berita maupun radio milik Jepang, pada waktu Perdana Menteri Suzuki menyampaikan berita bahwa Jepang takluk kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, dan satu hari setelahnya pada 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito menyampaikan melalui radio bahwasannya Jepang menyerah tanpa syarat. Dengan adanya berita tersebut para pemuda mulai menyebarkan berita tersebut dan di Jakarta segera mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda di Jakarta yang menjadi bagian dari *Komite Van Aksi* (komunitas pemuda yang dibentuk untuk

mendukung kemerdekaan Indonesia) memerintahkan anggotanya yang bekerja di Kantor Berita *Domei* (kantor berita milik Jepang) untuk segera mengatur penyiaran berita Proklamasi (Sukadri et al., 1991).

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada pagi hari di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 jam 10.00 pagi oleh Soekarno dan Hatta. Naskah proklamasi tersebut dibuat di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda setelah disepakati bersama oleh para tokoh nasional dan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya para pemuda mulai melakukan penyebaran berita tersebut baik melalui berita koran, majalah, maupun radio. Dalam proses penyebaran berita para pemuda mengalami sedikit rintangan dari Jepang tetapi berhasil mereka lewati, mereka tersebar ke daerah- daerah dengan menaiki kereta api, kereta api tersebut menuju Bandung, Yogyakarta, Solo, Pati, dan Kediri (Sukadri et al., 1991).



**Gambar 2.** Berita Kemerdekaan (Soeara Asia, 18 Agustus 1945)  
Sumber: www.niod.nl

Berita kemerdekaan ini telah terdengar sampai Jawa Timur, bahkan dalam penyebarannya dibantu juga melalui para pemuda yang menjadi kurir yang sebelumnya telah dikumpulkan di Kantor Badan Pembantu Prajurit di Surabaya. Dalam penyebaran tersebut tidak hanya berita kemerdekaan saja yang disampaikan akan tetapi termasuk untuk melakukan pengibaran Bendera Indonesia. Selama penyebaran berita di Surabaya rakyat secara terus-menerus melakukan pergerakan serentak dengan memperdengarkan suara pembacaan proklamasi dengan menggunakan radio-radio yang ada di kampung mereka untuk menunjukkan kehormatan Bangsa Indonesia (Sukadri et al., 1991).

Sehari pasca Kemerdekaan, Indonesia mulai menata pemerintahannya sendiri maka PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sebelumnya dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia segera melaksanakan sidang untuk pembentukan pemerintahan (Adiwilaga et al., 2018). PPKI melaksanakan sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. PPKI sendiri merupakan panitia yang sebelumnya dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia untuk

menggantikan BPUPKI yang dibubarkan pada 6 Agustus 1945. Panitia ini juga memiliki peran untuk memusyawarahkan dan mengesahkan hal-hal yang sebelumnya dibuat oleh BPUPKI (Rohayuningsih, 2009). Dalam sidang pertama yang berlangsung pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk membantu presiden sementara waktu sampai MPR/DPR dibentuk (AK Pringgodigdo No. 17, 1945).

Pada sidang kedua 19 Agustus 1945, PPKI membentuk 12 Departemen yang terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Kemakmuran, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pekerja Umum, dan Departemen Perhubungan. Membentuk 4 tinggi yang terdiri dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara nasional. Serta menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang terdiri dari Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Pada sidang ketiga pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pengganti sementara Dewan Perwakilan Rakyat sebelum adanya pemilu, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat sebagai penjaga keamanan (AK Pringgodigdo No. 35, 1945; AK Pringgodigdo No. 5645, 1945).

Penetapan Provinsi hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penunjukan Gubernur pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai Gubernur adalah RMTA Soerjo yang sebelumnya menjabat sebagai Residen Bojonegoro dan dilantik pada 5 September 1945 (Disperpusip, 2020). Ini merupakan bentuk pembuatan sistem pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, Kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan daerah karena harus mengkoordinasikan daerahnya berdasarkan kewenangan-kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat (Bura et al., 2023).

Pada 19 Agustus 1945, Komite Nasional Pusat melaksanakan sidang untuk pertama kalinya dan Soekarno menyampaikan bahwasannya bangsa Indonesia baik pemerintah maupun rakyat harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menyegerakan dalam mencari pengakuan Kemerdekaan secara Internasional (Raliby, 1953). Dalam prosesnya baik pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya dalam menghadapi pihak asing yang ingin kembali menguasai Indonesia, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur juga terlibat konflik dengan Jepang pada bulan Agustus, September, dan di pertengahan Oktober 1945 (Suwondo, 1978).

Sementara itu pada tanggal 25 Oktober 1945, Gubernur Soerjo melaksanakan rapat bersama dengan seluruh residen di Jawa Timur untuk membahas permasalahan ekonomi. Kemudian datang Perwira Inggris utusan Brigadir Jenderal Mallaby dengan tujuan memaksa Gubernur Soerjo datang ke kapal mereka yang sedang berada di Pelabuhan Ujung dan Tanjung Perak, utusan tersebut kembali ke kapal mereka karena ditolak oleh Gubernur sehingga tanpa seizin pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pasukan Inggris dan NICA (Abdulgani, 1964).

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Departemen Penerangan mengumumkan diadakannya persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan sekutu. Tetapi pada sore hari terjadi insiden besar berupa terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby di Surabaya yang mengakibatkan kemarahan di pihak Inggris, kematiannya masih menjadi misteri karena banyaknya pendapat terkait hal ini. Kemudian pada 9 November 1945, Inggris memberi peringatan keras terhadap pemerintah daerah Jawa Timur untuk segera menyerahkan senjata dengan paling lambat penyerahan pada 10 November 1945. Apabila peringatan tersebut dihiraukan maka pasukan sekutu dan NICA akan menggempur Surabaya secara masif ([Disperpusip, 2020](#)).

Sementara itu, peringatan dari sekutu mendapatkan perlawanan dari rakyat Surabaya termasuk dari Dr. Mustopo sebagai Komandan TKR Jawa Timur dengan membentuk Komando Pertahanan dengan ikrarnya “merdeka atau mati” dan menunjuk Sungkono sebagai komandannya. pada jam 11 malam 9 November 1945 Gubernur Soerjo juga menanggapi peringatan tersebut dengan menyampaikan pidato melalui radio untuk memberikan semangat dan membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia sehingga mereka siap dalam menghadapi segala ancaman dari sekutu atas mempertahankan kemerdekaan ([Disperpusip, 2020](#)). Keesokan harinya Bung Tomo dengan sikap tegas dan beraninya juga menyampaikan pidato didepan para pemuda untuk membakar semangat mereka dalam berjuang menjaga tanah air ([Waid, 2019](#)).

Serangan yang dilakukan oleh Sekutu dan NICA pecah pada 10 November 1945, mereka membawa persenjataan lengkap dan tidak dapat dicegah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat dan pemerintah maka seluruh bagian pemerintahan Gubernur Jawa Timur harus segera dipindahkan maka dipindahkanlah ke daerah Sepanjang (Sidoarjo) ([Disperpusip, 2020](#)). Dalam proses pemindahan pemerintah Provinsi Jawa Timur seluruh gudang persenjataan dan perbekalan mulai dipindahkan keluar kota, kemudian pengosongan gudang persenjataan serta amunisi juga dilakukan di Pulau Madura secara cepat agar tidak digunakan oleh Belanda dan gudang-gudang tersebut nantinya dibumi hanguskan oleh para pemuda Surabaya ([Notosusanto, 1985](#)).

Perpindahan Provinsi Jawa Timur keluar Kota Surabaya ini dilakukan secara cepat karena agar pemerintah segera melakukan reorganisasi, konsolidasi, serta menjalin kerjasama dalam penataan ulang pemerintahan bersama pemerintah daerah setempat ([Dani & Purwaningsih, 2017](#)). Meskipun kepindahan telah dilakukan ke daerah Sepanjang pada malam hari berdasarkan kondisi yang ada pemerintahan dipindahkan kembali ke Mojokerto dan menyusun pemerintahan bersama Karesidenan Mojokerto, kemudian pada 17 November 1945 pemerintahan dipindahkan kembali ke Kediri, dan untuk pemerintahan Karesidenan Surabaya tetap berada di Mojokerto sampai pecahnya peristiwa Agresi Militer Belanda I pada 17 Maret 1947 ([Japen Jawa Timur hal. 12](#)).

Pada Februari 1947 pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah lagi dari Kediri ke Kota Malang sebagai bentuk konsolidasi pemerintah dalam usahanya mencari daerah yang lebih aman ([Japen Jawa Timur hal. 13](#)). Pada 25 Februari 1945 sampai 6 Maret 1947 di Kota Malang mengadakan sidang pleno ke lima KNIP di gedung yang sekarang dikenal sebagai “sarinah”, sidang ini menjadi perhatian seluruh dunia dikarenakan menjadi

penentu tidak atau diterimanya naskah Perjanjian Linggarjati yang oleh KNIP diparaf pada tanggal 15 Februari 1947, berdasarkan hasil sidang tersebut maka pada tanggal 25 Maret 1947 naskah Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda di Jakarta (Suwondo, 1978).

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berada di Malang telah melakukan mutasi termasuk Gubernur Soerjo yang menjadi Dewan Pertimbangan Agung di Yogyakarta, R. P. Soeroso dipilih untuk menjadi Gubernur tetapi memunculkan pro dan kontra sehingga Pemerintah pusat menunjuk Dr. Moerdjani pada Juni 1947 dan resmi menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur (Japen Jawa Timur hal. 14). Pada tanggal 26 Juli 1947 jam lima sore diadakan rapat secara ketat oleh pemerintah Jawa Timur yang diwakilkan oleh wakil gubernur bersama dengan pemerintahan daerah Malang, untuk membahas kondisi Malang, setelah berhasilnya aksi bumi hangus pada 22 Juli 1947 sehingga Belanda gagal untuk menduduki Malang, dalam rapat tersebut wakil gubernur menyampaikan kepada yang hadir untuk selalu menjalin kerjasama untuk memperkuat pertahanan dan rapat diakhiri pada 18.10 dengan teriakan “merdeka” (ANRI, Kempen No. 408).

Sementara itu, Belanda sebelumnya pernah melanggar perjanjian gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 dengan mengirim pasukannya untuk menduduki Kota Krian, Sidoarjo pada tanggal 24 Januari 1947, dan Mojokerto pada tanggal 17 Maret 1947. Dan hal itu terjadi lagi mereka melanggar Perjanjian Linggarjati, Pada tanggal 20 Juni 1947 Pemerintah Belanda memberikan perintah kepada Van Mook untuk melakukan kekerasan terhadap pemerintah terhadap Republik Indonesia untuk menguasai wilayah perkebunan dan sumber minyak, bahkan pada 18 Juli 1947 Van Mook memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan agresi sehingga pada 20 Juli 1947 Van Mook mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa Belanda tidak terikat dengan Perjanjian Linggarjati (Sukadri et al., 1991).

Pada tanggal 21 Juli 1947 atau 20 Juli 1947 pukul 12 malam Belanda memulai Agresi militernya yang pertama dengan tujuan menguasai kota-kota penting agar wilayah Republik Indonesia semakin mengecil (Dekker, 1969). Penyerangan di wilayah Jawa Timur Belanda melakukan serangan ke Daerah Surabaya, Malang, Besuki dan Madura, berdasarkan laporan dari R.A.A. Soedjadi yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Residen Malang bahwa tentara Belanda mulai datang pada tanggal 31 Juli 1947 melewati daerah Blimbing. Pada tanggal 4 Agustus 1947 terdapat pertemuan antara pihak Belanda dengan perwakilan Pemerintah Malang dan Sipil untuk membahas mengenai kedudukan pegawai pemerintah Indonesia, pengibaran bendera merah putih, penggunaan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar dan pembayaran gaji pegawai dengan ORI. Berdasarkan laporan tersebut kondisi perekonomian Kota Malang sedikit terdapat masalah utamanya untuk kebutuhan beras dan garam sehingga dibentuklah organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut (ANRI, Kemendagri No. 137).

Dalam Agresi Militer tersebut pihak Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting seperti Krian, Sidoarjo, Mojokerto termasuk Kota Malang yang mengakibatkan wilayahnya tidak aman lagi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus berpindah lagi dan Blitar menjadi tujuan pemerintah. Pada

masa Dr. Moerdjani menjabat sebagai Gubernur terjadi banyak gejolak yang memunculkan kekhawatiran adanya serangan dari pasukan Belanda sehingga demi keamanan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Moerdjani mengirim surat kepada R. Samadikoen selaku Residen Madiun pada tanggal 18 Agustus 1947. Surat tersebut berisikan permohonan gubernur kepada Residen Madiun untuk menyiapkan perumahan dan perkantoran yang akan digunakan seluruh anggota Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun permintaan tersebut disetujui kepindahan pemerintahan tersebut dibatalkan karena adanya surat dari Dewan Pertahanan Negara dan Menteri Dalam Negeri yang diterima oleh Gubernur Moerdjani pada tanggal 10 Agustus 1947. Surat tersebut berisikan perintah untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berada di Blitar karena adanya siasat pemerintah pusat ([ANRI, Kemendagri No. 135](#)).

Agresi Militer Belanda yang pertama berakhir setelah adanya penandatanganan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, perjanjian ini mengakibatkan wilayah Republik Indonesia di Jawa Timur semakin kecil wilayah tersebut meliputi Karesidenan Madiun, Kediri, Bojonegoro, sebagian Karesidenan Malang dan Surabaya. Dalam perjanjian tersebut juga memerintahkan pasukan dari Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan Belanda untuk segera berpindah ke wilayah Republik Indonesia ([Suwondo, 1978](#)). Sedangkan Belanda di wilayah kekuasaannya mendirikan Negara Madura pada 20 Februari 1948 dan Negara Jawa Timur pada 26 November 1948 ([Disperpusip, 2020](#)).

Dalam Pembicaraan terkait keberlanjutan pembahasan Perjanjian Renville Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia melakukan perundingan dari Januari sampai September 1948, tetapi selama perundingan tersebut tidak pernah mendapatkan hasil yang sesuai karena Belanda berupaya melemahkan posisi Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 September 1948 Belanda menyampaikan pesan kepada KTN (Komisi Tiga Negara) yang dibentuk sebelumnya oleh PBB untuk menyelesaikan permasalahan sengketa bahwa berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia sudah tidak berguna ([Kahin, 2013](#)).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang Ibu kota RI Yogyakarta, maka dimulailah Agresi Militer Belanda yang kedua. Presiden dan Wakil Presiden RI ditawan oleh mereka sehingga terbentuklah pemerintah darurat yang dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri kemakmuran ([Sapto, 2018](#)). Agresi Militer Belanda yang kedua juga berdampak pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur karena pada tanggal 21 Desember 1948 pasukan Belanda menyerang TNI yang sedang Pembangkit Listrik di Mendalan (Malang perbatasan Kediri) yang menjadi pembangkit listrik utama di Jawa Timur ([Sukadri et al., 1991](#)).

Sementara itu, serangan Belanda berlanjut ke Blitar sehingga Gubernur Moerdjani dan para stafnya bergeser ke lereng Gunung Wilis bersama Gubernur Militer Kolonel Sungkono untuk melanjutkan gerilyanya. Tetapi pada 24 Februari 1949 pasukan Belanda menyerbu lereng Gunung Wilis dan berhasil menangkap Gubernur Moerdjani dan wakilnya Dul Arnowo pejabat tinggi lainnya, mereka dibawa ke Surabaya (Hotel Oranye). Ditangkapnya Gubernur Moerdjani mengharuskan adanya pemimpin pengganti maka secara diam-diam melalui kurir Gubernur menyampaikan pesan secara lisan yang ditujukan kepada Residen Surabaya yaitu Sudirman untuk sementara memimpin

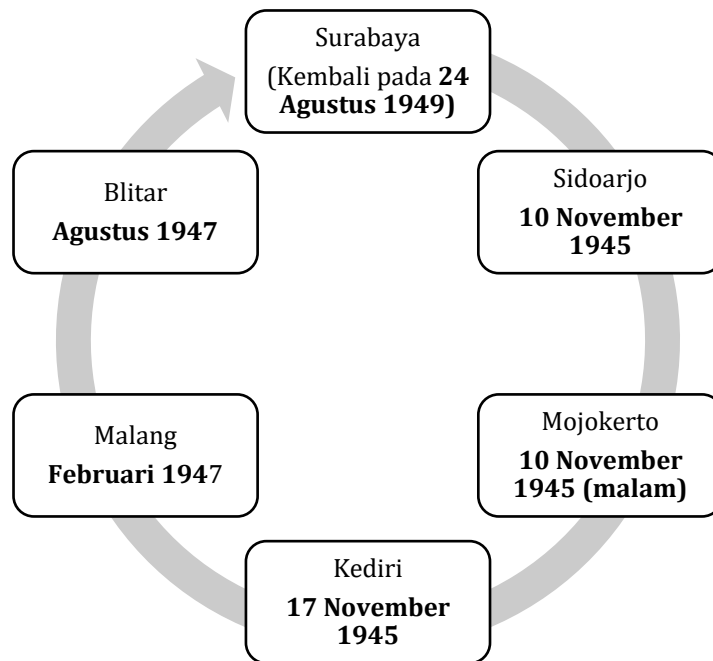
Pemerintahan Jawa Timur, tetapi pada 9 April 1949, Residen Sudirman meninggal karena sakit di Kediri ([Japen Jawa Timur hal. 16](#)).

Pemerintahan dilanjutkan oleh wakilnya yaitu Samadikoen yang sebelumnya mendapat tugas dari Gubernur Militer Sungkono untuk terus melanjutkan perjuangan di Lodoyo (Blitar Selatan) bersama dengan Darmadi yang menjabat sebagai Bupati Blitar ([Japen Jawa Timur hal. 17](#)). Pada tanggal 15 Maret 1949, Samadikoen diangkat menjadi Gubernur oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan diperintahkan untuk menjalin hubungan secara langsung dengan Residen-residen di Jawa Timur selama dua bulan. Berdasarkan laporan yang ditulis pada 22 Mei 1949. Perjalanan ini menghasilkan catatan dari kondisi setiap daerah yang dikunjungi baik politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Dengan kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia dapat meraih kemenangan ([Japen Jawa Timur hal. 19](#)).

Catatan tersebut menunjukkan bahwasannya selama Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda tidak dapat menghilangkan Pemerintah Republik Indonesia meskipun para pemimpin ditangkap pemerintahan terus berlanjut. Dengan ini PBB dengan UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia*) yang bertugas untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Belanda dengan Indonesia membuat sebuah perjanjian yang disebut Roem Royen sebagai bentuk penyelesaian konflik secara damai pada 7 tanggal 7 Mei 1949 ([Japen Jawa Timur hal. 18](#)).

Perjanjian tersebut mengharuskan Soekarno dan Hatta pada tanggal 6 Juli harus dikembalikan ke Yogyakarta, dan gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1949. Gencatan ini disampaikan oleh Presiden Soekarno dengan perintah ke seluruh pasukan Republik Indonesia untuk gencatan senjata dan berlaku sejak 10 Agustus 1949 ([Japen Jawa Timur hal. 20](#)). Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang membuahkan kesepakatan berupa penetapan bahwa penyerahan dan kedaulatan seutuhnya dan tanpa syarat oleh Belanda paling lambat 30 Desember 1949 meliputi seluruh wilayah kecuali Irian Barat ([Kahin, 2013](#)).

Hasil Konferensi ini membuat perubahan kepada wilayah Jawa Timur karena adanya pengembalian wilayah madiun pada tanggal 15 November 1949, Bojonegoro pada tanggal 18 Desember 1949, dan penarikan pasukan Belanda yang ada di Kediri ([Jawatan Penerangan Jawa Timur 1945-1949, 1950](#)). Dengan ini Gubernur Samadikoen dan staf pemerintah Jawa Timur bersama dengan Gubernur Militer Kolonel Sungkono kembali Ke Surabaya pada tanggal 24 Agustus 1949 dan melanjutkan pemerintahannya di Surabaya dengan beralihnya pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia ([Suwondo, 1978](#)).



**Gambar 3.** Bagan Perpindahan Pemerintahan Ibukota Provinsi Jawa Timur pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai pada KMB maka pihak Belanda memberikan kedaulatan penuh terhadap Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan hasil KMB bahwa RIS memiliki 16 negara bagian termasuk Negara Jawa Timur dan Negara Madura (Tasnur & Fadli, 2019). Menurut elit Jawa Timur adanya RIS ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini serta Republik Indonesia yang sebelumnya diperjuangkan untuk berdiri menjadi percuma karena menjadi bagian RIS, dalam perkembangannya muncul reaksi untuk segera membubarkan negara bagian dari rakyat, instansi pemerintah, dan partai-partai politik yang melepas hubungan mereka dengan negara bagian dan menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia (Sapto, 2012).

Pada Desember 1949 pemerintahan Negara Jawa Timur mengalami banyak tekanan sehingga pemerintahan tidak berjalan dan akhirnya diserahkan kepada RI. Setelah melalui diskusi antara pemerintah RI dengan RIS berdasarkan keputusan Presiden No. 109 tahun 1950 Negara Jawa Timur dibubarkan dan kembali menjadi bagian Republik Indonesia dan disusul pembubaran Negara Madura yang sedikit lambat karena posisi pemerintahannya yang kuat, pembubaran Negara Madura berdasarkan Keputusan Presiden No. 110 Tahun 1950 (Sapto, 2012).

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 yang diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1950 mengenai Terbentuknya Provinsi Jawa Timur. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 bahwa hari jadi Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada 12 Oktober 1945.

## **KESIMPULAN**

Perjuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan rakyatnya dalam mempertahankan kemerdekaan terus menerus dilakukan, berawal dari terbunuhnya

Brigadir Jenderal Mallaby yang membuat Inggris marah dan akhirnya pecahnya perang 10 November 1945 di Surabaya membuat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus dipindahkan keluar kota, perpindahan pusat pemerintahan ini terjadi beberapa kali selama masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, pada masa Gubernur RMTA Soerjo pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah ke Sepanjang (Sidoarjo), Mojokerto, Kediri, dan Malang. Kemudian ketika di Malang terjadi mutasi para pejabat akhirnya Gubernur RMTA Soerjo diganti oleh Dr. Moerdjani, pada waktu ini pemerintahan Provinsi Jawa Timur berpindah ke Blitar karena Kota Malang sudah diduduki oleh Belanda, di Blitar pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat berpindah tempat dari kota ke lereng Gunung Wilis, disinilah Gubernur Moerdjani ditangkap. Pemerintahan Jawa Timur dilanjutkan oleh Samadikoen di Ledoyo (Blitar Selatan) atas perintah PDRI. Gubernur Samadikoen juga berkeliling untuk mengetahui setiap residen di Jawa Timur selama dua bulan untuk meneruskan Gerilya di Jawa Timur. Sampai keluarlah hasil Konferensi Meja Bundar yang akhirnya seluruh kedaulatan kembali ke Indonesia dan pada 24 Desember 1949. Perpindahan pusat pemerintahan yang telah dilakukan selama 5 tahun ini merupakan sebuah upaya pemerintah untuk terus menjalankan pemerintahannya dan terus berkoordinasi dalam melakukan gerilya sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwasannya pada masa itu eksistensi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih berlanjut meskipun ada Intervensi dari pihak asing.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdulgani, R. (1964). *Heroes day and The Indonesian revolution*. Prapanca Publishing House.
- Abdurrahman, D. (1999). *Metode penelitian sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Deepublish .
- Ahmad, A. A. (2019). Pembentukan wilayah pertahanan Priangan Timur dan perpindahan Ibukota Propinsi Jawa Barat ke Lebaksiuh tahun 1947-1948. *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies, 1(2)*, 14–22.
- AK Pringgogidgo No. 17, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945).
- AK Pringgogidgo No. 35, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945).
- AK Pringgogidgo No. 5645, Arsip Nasional Republik Indonesia (1945).
- Arif, T. (2008). *Riwayat hari jadi Provinsi Jawa Timur*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis ekonomi di Banyumas 1930-1935 sampai perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto tahun 1937. *Journal of Indonesian History, 6(1)*, 12–20.
- Armiati, S. A. (2017). *Perpindahan ibukota Provinsi Jawa Timur ke Blitar tahun 1947-1949 dan kontribusi terhadap materi sejarah lokal pembelajaran sejarah*. Universitas Negeri Malang.
- Aurumbita, Y. N. (2015). *Pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru* . Universitas Gajah Mada.

- Bura, A. F., Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2023). *Pemerintahan daerah: konsep teori dan karakteristik*. Eureka Media Aksara.
- Dani, A., & Purwaningsih, S. M. (2017). Kepemimpinan Gubernur Suryo selama Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 5(3)*, 1080–1099.
- Dekker, I. N. (1969). *Sejarah Indonesia baru 1945-1949*. IKIP Malang.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2010). *Profil Jawa Timur*. Pemerintah Jawa Timur.
- Disperpusip. (2020). *Profil Gubernur Jawa Timur 1945-2019*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 13(2)*, 189–205.
- Jawatan Penerangan Jawa Timur 1945-1949, Kementerian Penerangan (1950).
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan revolusi Indonesia* ((Terjemahan)). Komunitas Bambu.
- Kementerian Dalam Negeri No. 135, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri No. 137, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Penerangan No. 408, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. BENTANG.
- Moertono, S. (2017). *Negara dan kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nasution A. H. (1978). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia: Agresi Militer Belanda I jilid 5*. Disjarah-AD & Penerbit Angkasa.
- Notosusanto, N. (1985). *Pertempuran Surabaya*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010a). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II: Zaman Kuno*. Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010b). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Raliby, O. (1953). *Documenta historica: sedjarah dokumenter dari pertumbuhan dan perjuangan Negara Republik Indonesia*. Bulan Bintang.
- Rohayuningsih, H. (2009). Peranan BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial, 36(2)*, 184–194.
- Sapto, A. (2012). Nasionalisme lokal Elite Jawa Timur dalam krisis pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948–1950. *Humaniora, 24(1)*, 18–28.
- Sapto, A. (2013). Perang, militer dan masyarakat: pemerintahan militer pada Masa Revolusi dan pengaruhnya pada Indonesia Kini. *Sejarah dan Budaya, 7(1)*, 18–33.
- Sapto, A. (2015). Pelestarian kekuasaan pada Masa Mataram Islam: Sebha jaminan loyalitas daerah terhadap pusat. *Sejarah dan Budaya, 9(2)*, 153–161.

- Sapto, A. (2018). *Republik dalam pusaran elite sipil dan militer*. Matapadi.
- Soeara Asia. (1945, Agustus 18). Proklamasi Indonesia Merdeka. *Niod Library*.
- Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 287/289. (1939). *Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 287/289*.
- Staatsblad Van Nederlandsch-indie No. 295 (1928).
- Stemfoort, J. W., Siethoff, J. J. ten, & Eckstein, C. (1885). Kaart van Oost-Java. *Universitaire Bibliotheken Leiden*.
- Sudarno. (1993). *Sejarah pemerintahan militer dan perang pamong praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Balai Pustaka.
- Sukadri, H., Soewarno, & Umiati. (1991). *Sejarah revolusi kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya sebuah elit birokrasi. Seri sejarah Sosial no 2. Alih Bahasa. Drs. Sunarto. Cetakan Pertama*. Sinar Harapan.
- Sutikno, S. (2007). *Perpindahan Ibu Kota Negara suatu keharusan atau wacana*.
- Suwardono. (1997). *Monografi sejarah Kota Malang*. Sigma Media.
- Suwondo, B. (1978). *Sejarah Daerah Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tasnur, I., & Fadli, M. R. (2019). Republik Indonesia Serikat: tinjauan historis hubungan kausalitas peristiwa-peristiwa Pasca Kemerdekaan terhadap pembentukan negara RIS (1945-1949). *Candrasangkal*, 5(2), 58–67.
- Triyana, H. (2013). Perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. *Jurnal Avatara*, 1(2), 204–214.
- Waid, A. (2019). *Bung Tomo*. Laksana.
- Zanki, N. (2014). Perpindahan Ibukota pemerintahan Kabupaten Semarang dari Kota Semarang ke Kota Ungaran tahun 1971-1983. *Journal of Indonesian History*, 3(1).